



**DINAS KOPERASI, UKM
PROVINSI SUMATERA BARAT**

LAPORAN KINERJA TAHUN 2017



Jl. Khatib Sulaiman No. 11 Padang
Telp. (0751) 7055298 - 7055292 Fax. (0751) 7052701
Email : diskop@sumbarprov.go.id

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1. LATAR BELAKANG	1
	1.2. MAKSUD DAN TUJUAN	2
	1.3. GAMBARAN ORGANISASI	2
	1.3.1 KEDUDUKAN	2
	1.3.2. TUGAS POKOK DAN FUNGSI	3
	1.3.3. STRUKTUR ORGANISASI	7
	1.3.4. SUMBER DAYA MANUSIA	9
	1.4. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI	9
BAB II	PERENCANAAN KINERJA	15
	2.1. VISI DAN MISI	16
	2.2. TUJUAN DAN SASARAN	16
	2.3. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015	18
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	24
	3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	24
	3.2. PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN INI DENGAN TAHUN LALU	25
	3.3. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA SAMPAI DENGAN TAHUN INI DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH YANG TERDAPAT DALAM DOKUMEN PERENCANAAN STRATEGIS	39
	3.4. EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA	41
	3.5 ANALISA PROGRAM DAN KEGIATAN PENUNJANG KINERJA TAHUN 2017	41
	3.6 REALISASI DAN EFISIENSI ANGGARAN	45
BAB VII	PENUTUP	
	4.1. KESIMPULAN	52
	4.2. SARAN	53
	LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Kualifikasi Pendidikan Pegawai	9
Tabel 2. Kualifikasi Panbngkat Dan Golongan	9
Tabel 3. Hubungan Hirarkis antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Kebijakan	17
Tabel 4. Matrik Hubungan Antara Tujuan dan Sasaran	18
Tabel 5. Perjanjian Kinerja	19
Tabel 6. Capaian Kinerja Tahun 2016	25
Tabel 7. Perkembangan Aseet Koperasi Kab/Kota	27
Tabel 8. Pertumbuhan volume usaha koperasi kab/kota	29
Tabel 9. Pembobotan Nilai Evaluasi Tahun 2017	33
Tabel 10. Realisasi Fisik Program/Kegiatan	35
Tabel 11. Pencapaian Sasaran Strategis sesuai Target Jangka Menengah Yang terdapat dalam dokumen Perencanaan Strategis Organisasi	39
Tabel 12. Realisasi Anggaran Per Sasaran	46
Tabel 13. Realisasi Anggaran Dekonsentrasi Tahun 2017	51

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 33 UUD 1945, ditujukan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam bidang ekonomi melalui tiga prinsip dasar ekonomi kerakyatan yakni; perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, bumi, air dan segala kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, sehingga dalam pembangunan Koperasi dan UKM dilaksanakan melalui pendekatan keberpihakan (*affirmative*) dan pendekatan pengembangan kemandirian.

Pendekatan keberpihakan diwujudkan dalam bentuk pemberian kesempatan berusaha, dukungan peningkatan kapasitas usaha dan ketrampilan, serta perlindungan usaha terutama bagi Koperasi dan UKM yang berkembang di antara masyarakat berpenghasilan rendah. Pada saat yang sama, pembangunan Koperasi dan UKM diarahkan untuk membangun kemandirian dan daya saing melalui penciptaan iklim yang kondusif, penerapan IPTEK dan penguatan skala ekonomi sehingga memiliki posisi tawar yang tinggi dalam menghadapi kondisi pasar yang dinamis. Selanjutnya pembangunan Koperasi dan UKM juga diarahkan untuk memperkuat peningkatan kontribusinya dalam perekonomian, baik dalam penanggulangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja maupun dalam peningkatan nilai tambah perekonomian yang menyokong pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pembangunan yang berkelanjutan.

Kehadiran lebih dari 4000 Koperasi dan 593.100 UMKM di Sumatera Barat, telah mampu menyerap banyak tenaga kerja, dan menjadi dominasi kegiatan perekonomian masyarakat karena pelaku Koperasi dan UMKM menyebar hingga ke pelosok pedesaan. Sebagian besar berorientasi pasar dalam negeri,

antara lain produk makanan ringan, barang-barang kerajinan, konveksi, sulaman, perbengkelan. Sebagian nya ikut berperan aktif untuk memajukan pariwisata. Namun kontribusi Koperasi dan UKM seakan akan belum memberikan sumbangan yng berarti, karena gerakan Koperasi dan UKM jarang dipublikasikan.

Kedepannya peningkatan daya saing Koperasi dan UKM mampu tumbuh menjadi usaha yang berkelanjutan dengan skala yang lebih besar melalui langkah strategi : Peningkatan kualitas SDM, Peningkatan akses pembiayaan dan perluasan skema pembiayaan, peningkatan nilai tambah produk dan jangkauan pemasaran, penguatan kelembagaan, peningkatan kemudahan, kepastian dan perlindungan usaha.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi pemerintah dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi pemerintah dengan maksud :

- a) Mengukur tingkat pencapaian/keberhasilan sasaran strategis yang telah ditetapkan pada tahun 2017
- b) Mengevaluasi kinerja instansi pemerintah
- c) Untuk bahan penyusunan perencanaan tahun berikutnya

2. Tujuan

Tujuan penyusunan LAKIP adalah :

- a) Mewujudkan akuntabilitas instansi pemerintah kepada pihak-pihak terkait
- b) Mewujudkan perubahan-perubahan kearah perbaikan dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi.

1.3. GAMBARAN ORGANISASI

1.3.1. KEDUDUKAN

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor8 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 8), (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 128) , yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Adapun tugas pokok dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, dalam menyelenggarakan tugas tersebut, mempunyai fungsi sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera barat Nomor : 57 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi , sebagai berikut :

- 1) Perumusan kebijakan teknis dibidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
- 2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
- 3) Pembinaan dan fasilitasi bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah lingkup Provinsi dan Kabupaten/Kota
- 4) Pelaksanaan kesekretariatan dinas
- 5) Pelaksanaan fungsi kedinansan lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai tugas dan fungsinya.

1.3.2. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Adapun tugas pokok dan fungsi masing-masing Sekretariat dan Bidang pada Dinas Koperasi dan UMKM Propinsi Sumatera Barat adalah :

- 1) **Sekretariat**, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, hubungan masyarakat, protokol, penyusunan program dan keuangan.

Untuk menyelenggarakan tugas, Sekretariat mempunyai fungsi :

- (a) penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan program dinas
- (b) penyelenggaraan pembinaan dan penatan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas

- (c) Penyelenggaraan pengelolaan urusan keuangan, umum dan kepegawaian.
- 2) **Bidang Perizinan dan Kelembagaan**, mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dibidang perizinan, kelembagaan, monitoring, evaluasi pelaporan dan data koperasi
- 3) Untuk menyelenggarakan tugas Bidang Perizinan dan Kelembagaan mempunyai fungsi :
- (a) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan
 - (b) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan evaluasi di bidang kelembagaan
 - (c) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang monitoring, evaluasi, pelaporan dan data koperasi
- 4) **Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan**, mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dibidang pengawasn, pemeriksaan kelembagaan dan usaha simpan pinjam koperasi.
- Untuk menyelenggarakan tugas Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan mempunyai fungsi :
- (a) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penilaian
 - (b) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemeriksaan
 - (c) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penerapan peraturan dan sanksi
- 5) **Bidang Pemberdayaan Koperasi**, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dibidang pemberdayaan koperasi, fasilitasi usaha koperasi, peningkatan

kualitas sdm koperasi, pengembangan, penguatan dan perlindungan koperasi.

Untuk menyelenggarakan tugas Bidang Pemberdayaan Koperasi mempunyai fungsi :

- (a) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi usaha koperasi
- (b) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan kualitas sdm koperasi
- (c) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan, penguatan dan perlindungan koperasi

6) Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dibidang pemberdayaan usaha kecil, fasilitasi usaha kecil, pengembangan, penguatan dan perlindungan usaha kecil, peningkatan kualitas kewirausahaan.

Untuk menyelenggarakan tugas Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah mempunyai fungsi :

- (a) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi usaha kecil
- (b) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporandi bidang pengembangan, penguatan dan perlindungan usaha kecil
- (c) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan kualitas kewirausahaan

7) UPTD Balai Pendidikan dan Latihan Koperasi, mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas dibidang pendidikan dan latihan koperasi, Untuk menyelenggarakan

tugas pokok UPTD Balai Pendidikan dan Latihan Koperasi menyelenggarakan fungsi:

- (a) penyusunan rencana pembangunan teknis operasional pendidikan dan latihan koperasi
- (b) pengkajian dan analisa teknis operasional pendidikan dan latihan koperasi
- (c) pengujian dan persiapan teknologi pendidikan dan latihan koperasi dilapangan
- (d) pelaksanaan kebijakan teknis pendidikan dan latihan koperasi
- (e) pelaksanaan operasional pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan bidang pendidikan dan latihan koperasi
- (f) pelaksanaan operasional tugas teknis dinas sesuai dengan bidang pendidikan dan latihan koperasi
- (g) pelaksanaan pelayanan teknis administrasi ketatausahaan UPTD

1.3.3. STRUKTUR ORGANISASI

Dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat, struktur organisasi Dinas Koperasi dan UMKM Propinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

2. Sekretariat, yang membawahi :

- a. Sub. Bagian Tata Usaha
- b. Sub. Bagian Keuangan
- c. Sub. Bagian Program

3. Bidang Perizinan dan Kelembagaan, yang membawahi :

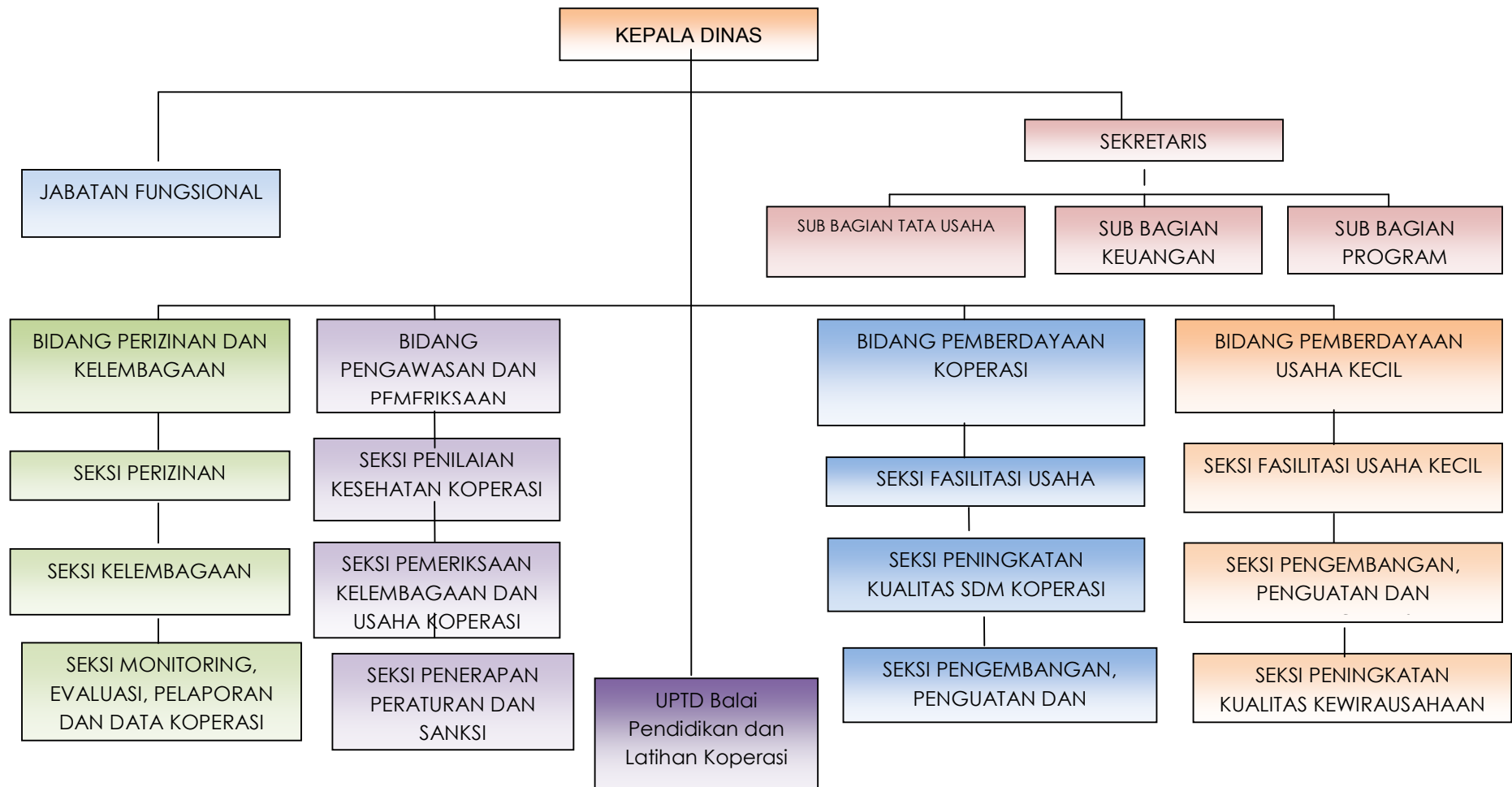
- a. Seksi Perizinan

- b. Seksi Kelembagaan
 - c. Seksi Monitoring dan Evaluasi.
- 4. Bidang Peengawasan dan Pemeriksaan, yang membawahi :**
- a. Seksi Penilaian Kesehatan Koperasi
 - b. Seksi Pemeriksaan Kelembagaan dan Usaha Koperasi
 - c. Seksi Penerapan Peraturan dan Sanksi.
- 5. Bidang Pemberdayaan Koperasi, yang membawahi:**
- a. Seksi Fasilitasi Usaha Koperasi
 - b. Seksi Peningkatan Kualitas SDM Koperasi
 - c. Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Koperasi
- 6. Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil, yang membawahi:**
- a. Seksi Fasilitasi Usaha Kecil
 - b. Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Kecil
 - c. Seksi Peningkatan Kualitas Kewirausahaan

Berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 061/8953/SJ perihal Rekomendasi Pembentukan Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 98 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Barat tanggal 29 Desember 2017, maka struktur organisasi UPTD Balai Pendidikan dan Latihan Koperasi (BALATKOP) Provinsi Sumatera Barat, terdiri atas :

- a. Kepala UPTD
- b. Kasubag Tata Usaha
- c. Kasi Pelaksanaan Program dan Pengembangan
- d. Kasi Penyelenggaraan Diklat

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KOPERASI UKM PROVINSI SUMATERA BARAT
(Perda Provinsi Sumatera Barat No. 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Prov. Sumatera Barat)



1.3.4. SUMBER DAYA MANUSIA

Untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut diatas, Dinas Koperasi dan UMKM Propinsi Sumatera Barat didukung oleh pegawai sebanyak 75 orang dengan kualifikasi yang tertera pada tabel berikut ini.

Tabel 1.
Kualifikasi Pendidikan Pegawai

	Pendidikan							JML
	SD	SMP	SMA	D3	S1	S2	S3	
PNS	0	0	33	5	27	10	-	75
Non PNS								
JUMLAH ORANG	1	1	33	5	27	10	-	75

Tabel 2.
Kualifikasi Pangkat dan golongan

JENIS KEPEGAWAIAN	GOL. I	GOL. II	GOL.III	GOL.IV	JUMLAH
PNS	0	9	52	14	75
PTT/HONOR	-	-	-	-	
JUMLAH ORANG	0	9	52	14	75

1.2 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan koperasi dan UKM disebabkan faktor internal dan faktor eksternal. Faktor eksternal yaitu perkembangan iklim usaha yang masih kurang mendukung yang disebabkan, antara lain oleh (1) ketidakpastian dan ketidakjelasan prosedur perizinan, dan timbulnya berbagai pungutan tidak resmi; (2) proses bisnis dan persaingan usaha yang tidak sehat; (3) lemahnya koordinasi lintas instansi

dalam pemberdayaan koperasi dan UMKM; dan (4) masih munculnya peraturan-peraturan daerah yang menghambat, termasuk pengenaan pungutan-pungutan baru kepada koperasi dan UMKM sebagai sumber pendapatan asli daerah.

Faktor internal yaitu jumlah Koperasi dan UMKM yang besar dari segi kuantitas masih belum didukung oleh perkembangan yang memadai dari segi kualitasnya sehingga kinerja UMKM masih tertinggal. Ketertinggalan kinerja UMKM tersebut disebabkan terutama oleh kekurangmampuan UMKM dalam bidang manajemen, penguasaan teknologi, dan pemasaran, serta rendahnya kompetensi kewirausahaan UMKM. Tingkat kinerja yang demikian juga berkaitan dengan lemahnya kemampuan dan posisi tawar untuk mengelola dan mengakses ke berbagai sumber daya produktif yang meliputi sumber-sumber permodalan, informasi, teknologi, pasar dan faktor produksi.

Masih terbatasnya sumber daya financial juga merupakan masalah utamabagi usaha mikro. Usaha mikro yang bermodal kecil umumnya tidak berbadan hukum dan masih menerapkan manajemen yang sangat sederhana. Oleh karena itu, usaha mikro ini sulit untuk memperoleh akses dari lembaga keuangan perbankan.

Permasalahan khusus yang dihadapi dalam pengembangan koperasi adalah masih belum meluasnya pemahaman tentang koperasi sebagai badan usaha yang memiliki struktur kelembagaan dan insentif yang unik/khas dibandingkan dengan badan usaha lainnya, serta kurang memasyarakatnya informasi tentang praktik berkoperasi yang paling benar (best practices). Bersamaan dengan masalah tersebut, koperasi dan UMKM juga menghadapi tantangan, terutama yang ditimbulkan oleh pesatnya perkembangan globalisasi ekonomi dan liberalisasi perdagangan bersamaan dengan cepatnya tingkat kemajuan teknologi.

Dari uraian diatas maka kendala dalam pengembangan Koperasi dan UKM meliputi, antara lain :

1. **Masih rendahnya produktifitas.** Produktifitas KUMKM masih dinyatakan rendah, sehingga akan menyebabkan skala yang dikelola terutama skala mikro dan kecil belum layak secara ekonomi. Dengan demikian perlu dilakukan pemberdayaan usaha mikro dan kecil melalui berbagai kegiatan yang menunjang pengembangan usahanya. Kegiatan pemberdayaan antara lain peningkatan kapasitas pengelola usaha mikro, kecil dan menengah melalui bimbingan, pelatihan dan pendampingan dalam pengelolaan usahanya melalui wadah badan hukum koperasi untuk memperkuat posisinya serta memperkuat kerjasama antar koperasi. Rendahnya produktifitas ini juga didukung dengan lemahnya penguasaan dibidang manajemen, penguasaan teknologi, dan pemasaran, serta rendahnya kompetensi kewirausahaan UMKM.
2. **Masih terbatasnya akses sumber daya produktif.** Usaha mikro dan kecil menghadapi masalah dalam peningkatan kapasitas usahanya, yaitu kurang tersedia *collateral* apabila akan memperoleh pinjaman/pembiayaan dari perbankan maupun lembaga keuangan. Dengan demikian perlu dikembangkan skim-skim pembiayaan yang membantu usaha mikro dan kecil, yaitu pembiayaan dengan pola syariah, juga dilakukan pendampingan dalam pemanfaatan pembiayaan tersebut.
3. **Masih rendahnya kualitas kelembagaan Koperasi.** Akhir-akhir ini beberapa Koperasi belum menjalankan tata kelola koperasi yang baik (*good cooperative governance*). Hal ini disebabkan bahwapendirian koperasi belum didasari atas kepentingan dan kesamaan ekonomi yang sama diantara anggota. Namun lebih menekan pada aspek bisnis saja, kurang memperhatikan prinsip-prinsip koperasi yang menjadi landasan operasionalnya. Kelembagaan dan organisasi belum dikelola secara sistem manajemen yang memadai, yaitu sebagian besar belum memiliki rencana jangka menengah dan panjang.
4. **Masih rendahnya kinerja Koperasi.** Rendahnya kualitas kelembagaan dan organisasi manajemen Koperasi akan menyebabkan kurang

optimalnya kinerja Koperasi. Dengan demikian diperlukan beberapa kegiatan usaha yang mengarah pada keterkaitan usaha koperasi dan usaha anggotanya. Disamping itu manajemen koperasi perlu dikelola dengan sistem manajemen yang memadai, yaitu memiliki rencana jangka menengah dan panjang serta mengembangkan manajemen kinerja koperasi dengan model Balanced Score Card (BSC) dengan beberapa penyesuaian-penyesuaian sesuai dengan karakteristik koperasi. Lebih lanjut dilakukan pemeringkatan oleh lembaga independen sebagai layaknya dilakukan oleh dunia pasar modal, yaitu Lembaga Rating, sehingga diharapkan praktik terbaik (best practice) dalam pengelolaan koperasi dapat dipantau dan dapat dijadikan contoh bagi koperasi lainnya.

5. **Masih kurang kondusifnya iklim usaha**, pengembangan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah (KUMKM) memerlukan iklim yang kondusif, yaitu prosedur perizinan yang belum dilakukan secara transparan, biaya transaksi perizinan yang mahal, pungutan secara tidak resmi. Peraturan-peraturan yang menghambat perkembangan usaha mikro, kecil dan menengah dengan berbagai alasan dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Adapun dasar hukum yang mendasari pelaksanaan pembangunan koperasi dan UMKM, yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
- 2) Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 3) Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- 4) Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- 5) Undang-Undang (UU) Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- 6) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

- 7) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 8) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal.
- 9) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
- 10) Peraturan Presiden RI (Perpres) Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014.
- 11) Instruksi Presiden RI (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal.
- 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
- 15) Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021.
- 16) Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Suunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembar Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 8), Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 128).
- 17) Peraturan Gubernur Nomor 78 Tahun 2016 tentang Keduaukan, Susunan Organisasi dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 84 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016.

- 18) Peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 65 Tahun 2012 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Propinsi Sumatera Barat.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 maka Dinas Koperasi UKM Provinsi Sumatera Barat juga telah menyusun Rencana Strategis tahun 2016-2021 yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Barat Nomor 050/19/DISKOP-UMKM/IX/2016 tentang Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Barat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta mencapai sasaran strategisnya mengacu kepada Rencana Strategis dan Penetapan Kinerja.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Barat dimaksudkan untuk dapat “ Memberikan arah kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menjalankan berbagai program dan kegiatan untuk jangka waktu lima tahun. Adapun tujuan penyusunan Rencana Strategis adalah :

- 1) Untuk menetapkan prioritas program dan kegiatan yang strategis selama 5 (lima) tahun.
- 2) Untuk memberikan landasan kebijakan taktis strategi lima tahunan dalam kerangka pencapaian visi, misi sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan.

Dalam menunjang pembangunan koperasi dan UKM di Propinsi Sumatera Barat, Rencana Strategis secara khusus juga berfungsi sebagai :

- a) Pedoman dan acuan bagi aparat Dinas Koperasi dan UKM Propinsi Sumatera Barat dalam penyusunan rencana pengembangan yang sifatnya operasional dan rinci.
- b) Alat untuk mengendalikan pelaksanaan program pembangunan dan tolok ukur evaluasi keberhasilan pelaksanaan kegiatan pembangunan koperasi dan UKM.

2.1. VISI DAN MISI

Visi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat adalah :

“TERWUJUDNYA KOPERASI DAN UMKM YANG BERDAYA SAING SEBAGAI BASIS PEREKONOMIAN DAERAH UNTUK MENGHADAPI PASAR GLOBAL”

Adapun makna dari visi tersebut adalah Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat berusaha sungguh-sungguh memberdayakan Usaha koperasi dan UKM sebagai pelaku/ subyek perekonomian rakyat sehingga memiliki daya saing, tangguh serta mandiri. Kondisi ini diharapkan memungkinkan Koperasi dan UKM mempunyai posisi tawar dalam memecahkan masalah dengan bertumpu pada kepercayaan dan kemampuan sendiri.

Dalam merealisasikan visi dan memberikan arah serta tujuan yang akan diwujudkan, dan untuk memberikan focus terhadap Program yang akan dilaksanakan serta untuk menumbuhkan *sense of participation* and *sense of belonging* maka Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat menyatakan misi sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kinerja dan daya saing koperasi serta UKM dalam mengelola potensi ekonomi daerah
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerja Dinas Koperasi, UKM

2.2. TUJUAN DAN SASARAN

A. Tujuan

Dalam rangka mencapai visi dan misi Dinas Koperasi dan UKM seperti yang dikemukakan diatas, maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan kedalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis (*strategic goals*) organisasi.

Untuk itu, agar dapat diukur keberhasilan organisasi di dalam mencapai tujuan strategisnya, setiap tujuan strategis yang ditetapkan akan memiliki indicator kinerja (*performance indicator*) yang terukur. Rumusan tujuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas lembaga koperasi dan UKM
2. Dinas Koperasi, UKM berkinerja baik

B. Sasaran

Tujuan yang akan diwujudkan tersebut selanjutnya dirinci pada pencapaian sasaran setiap tahunnya. Secara umum, sasaran tahunan dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat ini menggambarkan kebijakan-kebijakan yang dihasilkan, serta perubahan perbaikan kondisi koperasi dan UKM yang diakibatkan oleh kebijakan tersebut.

Selanjutnya bagian berikut akan menjelaskan dan merinci masing-masing tujuan yang akan diwujudkan dalam lima tahun mendatang (2016-2021) beserta sasaran strategis sebagai berikut :

1. Meningkatnya peran koperasi dan UKM dalam pertumbuhan ekonomi daerah
2. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola organisasi Dinas Koperasi, UMKM

Tabel. 3
Hubungan hirarkis antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran,
Strategi dan Kebijakan

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1	Meningkatkan Kinerja dan Daya Saing Koperasi serta UKM Dalam Mengelola Potensi Ekonomi Daerah	Meningkatkan Kualitas Kelembagaan Koperasi dan UKM	Meningkatnya Peran Koperasi dan UKM Dalam Pertumbuhan Ekonomi Daerah	Meningkatkan tatakelola koperasi yang sesuai jati diri koperasi, berbasis sistem informasi	Peningkatan penyuluhan, pendampingan, diklat serta pengawasan
				Meningkatkan produktifitas, manajemen usaha, permodalan, pembiayaan anggota dan SDM pengelola dan pembina Koperasi	Peningkatan kapasitas usaha koperasi pertanian, non pertanian dan aneka usaha serta kemitraan, promosi, jaringan pemasaran serta pemupukan modal sendiri
				Meningkatkan kompetensi manajerial, standarisasi dan perkuatan produk , akses pembiayaan dan pemasaran produk UKM	Peningkatan penyelenggaraan diklat, pendampingan, fasilitasi standarisasi produk, akses permodalan,

					promosi, kemitraan serta pemasaran produk UKM
2	Meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerja Dinas Koperasi, UKM	Dinas Koperasi UKM berkinerja baik	Meningkatnya kualitas tata kelola Dinas Koperasi UKM	Meningkatkan kinerja pencapaian fisik dan keuangan serta kepuasan masyarakat	Penyempurnaan manajemen pelaporan, keuangan serta kualitas pelayanan publik

Tabel 4.
Matriks Hubungan Antara Tujuan dan Sasaran

No	TUJUAN	SASARAN	
		Uraian	Indikator
1	Meningkatkan Kualitas Kelembagaan Koperasi dan UKM	Meningkatnya peran koperasi dan UKM dalam pertumbuhan ekonomi daerah	Meningkatnya nilai aset koperasi
			Meningkatnya nilai omset koperasi
			Meningkatnya skala usaha UKM Binaan
2	Dinas Koperasi UKM berkinerja baik	Meningkatnya kualitas tata kelola Dinas Koperasi UKM	Capaian realisasi fisik pengelolaan program/kegiatan
			Capaian realisasi keuangan pengelolaan program/kegiatan

2.3. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang efektif, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Barat telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2017 dengan mempedomani Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Strategis Tahun 2016-2021 dan RPJMD Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021. Perjanjian kinerja 2017 adalah sebagaimana rincian tabel dibawah ini:

Tabel 5 .
Perjanjian Kinerja tahun 2017

	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target
1	Meningkatnya peran koperasi dan UKM dalam pertumbuhan ekonomi daerah	Meningkatnya nilai asset koperasi	%	8,50
		Meningkatnya nilai omset koperasi	%	7,50
		Meningkatnya skala usaha UKM binaan	%	1,20
2	Meningkatnya kualitas tata kelola organisasi	Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja	Kategori	B
		Capaian fisik pengelolaan program/kegiatan	%	100
		Capaian realisasi keuangan pengelola program/kegiatan	%	95

Sasaran1 ; Meningkatnya peran koperasi dan UKM dalam pertumbuhan ekonomi daerah

Pemberdayaan koperasi secara tersktuktur dan berkelanjutan diharapkan akan mampu menyelaraskan struktur perekonomian daerah, mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional, mengurangi tingkat pengangguran terbuka, menurunkan tingkat kemiskinan, mendinamisasi sektor riil, dan memperbaiki pemerataan pendapatan masyarakat. Pemberdayaan koperasi juga akan meningkatkan pencapaian sasaran di bidang pendidikan, kesehatan, dan indikator kesejahteraan masyarakat Indonesia lainnya

Peran koperasi dalam pertumbuhan ekonomi daerah dapat dilihat dari: (1) kedudukannya sebagai pemain utama dalam kegiatan ekonomi di berbagai sektor, (2) penyedia lapangan kerja yang terbesar, (3) pemain penting dalam pengembangan kegiatan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat, (4) pencipta pasar baru dan sumber inovasi, serta (5) sumbangannya dalam menjaga neraca pembayaran melalui kegiatan ekspor. Peran koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah sangat strategis dalam perekonomian daerah, sehingga perlu menjadi fokus pembangunan ekonomi nasional pada masa mendatang.

Koperasi sebagai organisasi social ekonomi memiliki karakteristik yang sesuai untuk dapat mengelola berbagai potensi yang dimiliki daerah secara lebih optimal. Peran koperasi tersebut diwujudkan melalui kegiatan usaha kolektif yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat (anggota) dalam kegiatan produksi, pengolahan dan pemasaran. Koperasi juga berperan untuk meningkatkan posisi tawar dan efisiensi kolektif anggotanya, baik sebagai produsen maupun konsumen. Efisiensi dan efektivitas usaha anggota koperasi dapat dicapai karena pemasaran, pembelian input produksi, pemanfaatan modal dan pengadaan serta penggunaan fasilitas usaha dilakukan secara bersama.

Peran UKM dalam perekonomian dapat ditunjukkan sebagai sumber pendapatan masyarakat, pemenuhan kebutuhan barang dan jasa domestic,

penciptaan lapangan pekerjaan, serta peningkatan nilai tambah yang berdampak pada penurunan angka kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi.

Dalam pencapaian sasaran meningkatnya peran koperasi dan UKM dalam pertumbuhan ekonomi daerah indikator kinerjanya adalah :

a. Meningkatnya nilai asset koperasi

Nilai asset koperasi merupakan seluruh kekayaan yang dimiliki dan dikelola koperasi untuk menjalankan operasional usaha. Aset merupakan sumber daya yang dikuasai koperasi sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dari mana manfaat ekonomi dimasa depan diharapkan akan diperoleh koperasi. Nilai asset koperasi terdiri atas kas, piutang, perlengkapan dan peralatan koperasi. Formulasi perhitungan meningkatnya nilai asset koperasi adalah sebagai berikut :

$$\text{Formulasi meningkatnya nilai asset koperasi} = \frac{(\text{nilai asset tahun } n - \text{nilai asset thn } n-1)}{\text{nilai asset tahun } n-1} \times 100\%$$

b. Meningkatnya nilai omset koperasi

Nilai omset koperasi atau volume usaha koperasi adalah total nilai penjualan atau penerimaan dari barang dan jasa pada suatu periode atau tahun buku yang bersangkutan. Dengan demikian volume usaha koperasi adalah akumulasi nilai penerimaan barang dan jasa sejak awal tahun buku sampai dengan akhir tahun buku. Untuk usaha simpan pinjam yang menjadi volume usahanya adalah semua jumlah pinjaman dari anggota koperasi. Sedangkan untuk usaha lain selain simpan pinjam volume usahanya dihitung berdasarkan jumlah penjualan dari usaha koperasi tersebut.

$$\text{Formulasi meningkatnya nilai omset koperasi} = \frac{(\text{volume usaha tahun } n - \text{volume usaha thn } n-1)}{\text{volume usaha tahun } n-1} \times 100\%$$

c. Meningkatkan skala usaha UKM binaan

Dalam perekonomian Indonesia Usaha Kecil dan Menengah merupakan kelompok usaha yang memiliki jumlah yang cukup besar. Kelompok UKM ini terbukti tahan terhadap berbagai macam goncangan krisis ekonomi. Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, pengertian Usaha Kecil dan Menengah adalah :

- 1) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan serta memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000 sampai adengan Rp. 500.000.000,-
- 2) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan serta memiliki kekayaan bersih antara Rp. 500.000.000,- sampai dengan Rp. 10.000.000.000

Indikator meningkatnya skala usaha UKM binaan dengan formulasi capaiannya sebagai berikut :

Formulasi meningkatnya skala usaha UKM binaan = $\frac{\text{jumlah usaha Kecil binaan yang meningkat usahanya menjadi usaha menengah tahun } n}{\text{jumlah usaha kecil binaan tahun } n-1} \times 100\%$

Sasaran 2 ; Meningkatkan kualitas tata kelola organisasi

Tata kelola organisasi merupakan suatu system yang mengatur pengelolaan organisasi yang bertujuan untuk menciptakan organisasi yang memiliki nilai tambah bagi pihak yang berkepentingan. Tata kelola organisasi ini sangat penting karena dengan adanya tata kelola yang baik maka akan berdampak kepada : 1) meningkatnya kinerja organisasi melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik; 2) mempermudah dalam pengelolaan anggaran yang berdampak pada meningkatnya nilai

organisasi; 3) meningkatkan kepercayaan masyarakat dan pihak-pihak lainnya.

Dalam pencapaian sasaran meningkatnya kualitas tata kelola organisasi, indikator yang mempengaruhinya adalah :

a. Indikator Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Akuntabilitas kinerja pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui system pertanggungjawaban secara periodic.

Kinerja pemerintah harus diukur agar dapat diketahui bagaimana pemerintah melaksanakan apa yang menjadi tanggungjawabnya. Pengukuran kinerja dapat dilakukan dengan mengukur kinerja keuangan dan kinerja non keuangan.

b. Indikator Capaian Fisik Pengelolaan Program/Kegiatan

Pelaksanaan penerapan penganggaran berbasis kinerja mensyaratkan perlunya setiap unit kerja untuk memiliki indicator kinerja dalam dokumen perencanaan dan penganggaran, merencanakan program atau kegiatan serta melaksanakan dan mengevaluasi capaian indicator kinerja yang telah ditetapkan. Penilaian kinerja merupakan proses interpretasi atas seluruh nilai capaian kinerja hasil pengukuran ke dalam informasi yang menggambarkan tingkat keberhasilan program/kegiatan untuk dianalisis lebih lanjut. Pengukuran capaian fisik pengelolaan program/kegiatan dilakukan dengan memperhatikan capaian output fisik yang mendukung kegiatan tersebut.

c. Indikator Capaian Keuangan Pengelolaan Program/Kegiatan

Indikator Capaian keuangan pengelolaan program/kegiatan menggambarkan pemakaian sumber daya keuangan dalam pencapaian suatu program/kegiatan. Pengukuran capaian pengelolaan keuangan sangat penting untuk dilaksanakan karena melalui pengukuran ini diharapkan kinerja pengelolaan kegiatan lebih terukur, akuntabel, dan terpadu. Disamping itu pengukuran ini juga bermanfaat dalam pengendalian pelaksanaan kegiatan di pemerintahan daerah.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran kinerja merupakan jembatan antara perencanaan strategis dengan pelaporan akuntabilitas. OPD dapat dikatakan berhasil jika indikator-indikator yang ditetapkan telah mengarah kepada pencapaian tujuan dan sasaran. Tanpa adanya pengukuran kinerja sangat sulit dicari pembenaran yang logis atas pencapaian tujuan dan sasaran OPD.

Capaian pelaksanaan kegiatan tahun 2017 ini diharapkan dapat mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan. Sasaran strategis Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat mengalami perubahan karena adanya hasil evaluasi dan Kemenpan RB. Sasaran strategis tersebut adalah:

1. Meningkatnya peran koperasi dan UKM dalam perekonomian daerah
2. Meningkatnya kualitas tata kelola organisasi

Sehubungan dengan pencapaian sasaran tersebut diatas maka dilakukanlah pengukuran kinerja dengan metode membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja dalam bentuk persentase, membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya.

Pengukuran kinerja pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 dilakukan dengan menggunakan asumsi-asumsi sebagai berikut :

- a. Tingkat pencapaian sasaran ditetapkan **sangat baik** apabila persentase pencapaian rencana tingkat capaian sasaran sebesar diatas 95%, **baik** apabila persentase pencapaian sebesar 75% - 95%, **cukup baik** apabila persentase pencapaian sebesar 50%-75%.
- b. Persentase capaian sasaran merupakan komulatif dari capaian program-program yang digunakan untuk pencapaian kinerja sasaran yang bersangkutan

Analisis capaian kinerja tahun 2017 Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Barat merupakan capaian tahun kedua Rencana Strategis Tahun 2016 – 2021, dengan capaian sebagai berikut :

Tabel 6.
Capain Kinerja Tahun 2017

	Sasaran Stretegis	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya peran koperasi dan UKM dalam pertumbuhan ekonomi daerah	Meningkatnya nilai asset koperasi	%	8,50	10,79	126,94
		Meningkatnya nilai omset koperasi	%	7,50	7,59	101,2
		Meningkatnya skala usaha UKM binaan	%	1,20	1,34	111,67
2	Meningkatnya kualitas tata kelola organisasi	Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja	kategori	B	B	100
		Capaian fisik pengelolaan program/kegiatan	%	100	99,97	99,97
		Capaian realisasi keuangan pengelolaan program/kegiatan	%	95	90,59	95,36

3.2. PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN INI DENGAN TAHUN LALU

Analisa capain kinerja Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Barat tahun 2017 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Sasaran 1	Meningkatnya peran koperasi dan UKM dalam pertumbuhan ekonomi daerah
------------------	---

A. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja

1. Meningkatnya nilai asset koperasi

Nilai asset koperasi terdiri atas aset lancar dan aset tidak lancar. Aset lancar adalah asset yang memiliki masa manfaat kurang dari satu tahun

misalnya :kas, bank, surat berharga, piutang persediaan, dll. Sedangkan asset tak lancar adalah d asset yang terdiri atas beberapa macam asset, masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi seperti investasi jangka panjang, asset tetap, bangunan, mesin dan kendaraan, dll.

Capaian indikator meningkatnya nilai asset koperasi adalah :

$$\frac{4.142.476.830.000 - 3.739.116.000.000}{3.739.116.000.000} \times 100\% = 10,79\%$$

Pada tahun 2016 nilai aset koperasi sebesar Rp. 3.739.116.000.000,- dan mencapai realisasi sebesar Rp 4.142.476.830.000,- pada tahun 2017, sehingga mencapai target pertumbuhan nilai aset sebesar 10,79 %.

2. Meningkatnya nilai omset koperasi

Nilai omset koperasi atau volume usaha koperasi adalah volume usaha simpan pinjam dan volume usaha sector riil. Peningkatan nilai omset koperasi pada tahun 2017 adalah sebagai berikut

$$\frac{5.106.216.630.000 - 4.745.847.630.000}{4.745.847.630.000} \times 100\% = 7,59\%$$

Pada tahun 2017 jumlah volume usaha koperasi sebesar Rp. 5.106.216.630.000,- yang terdiri atas volume usaha simpan pinjam sebesar Rp. 3.569.229.070.00 dan volume usaha sector riil sebesar Rp. 1.595.698.770.000. Sedangkan pada tahun 2016 volume usaha koperasi adalah sebesar Rp. 4.745.847.630.000. Peningkatan volume usaha ini disebabkan adanya peningkatan volume usaha sector pertanian seperti jagung dan peternakan seperti sapi.

3. Meningkatnya skala usaha UKM binaan

Usaha Kecil binaan propinsi Sumatera Barat pada tahun 2016 sebanyak 670 UKM dan usaha menengah sebanyak 21 UKM, pada tahun 2017 usaha kecil binaan tersebut meningkat menjadi 812 UKM usaha menengah sebanyak 30 UKM, sehingga capaian indikator meningkatnya skala usahakecil menjadi menengah adalah : $\frac{30-21}{670} \times 100\% = 1,34\%$

$$670$$

B. Analisa Penyebab Peningkatan/Penurunan Realisasi dari Target

Pada sasaran meningkatnya peran koperasi dan UKM dalam pertumbuhan ekonomi daerah, indikator kinerja sasaran mengalami peningkatan realisasi pada tahun 2017, hal ini dapat kami jabarkan sebagai berikut :

1) Meningkatnya nilai asset koperasi

Nilai asset koperasi merupakan total dari jumlah modal luar dan modal sendiri koperasi. Peningkatan nilai asset koperasi ini dipengaruhi adanya peningkatan asset koperasi di beberapa Kabupaten/kota seperti Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman Barat, Kota Bukittinggi dan Kota Padang. Perkembangan asset koperasi di kabupaten/kota adalah sebagai berikut :

Tabel 7
Perkembangan Aset Koperasi
Kabupaten/Kota

No	Kabupaten/Kota	Total Asset Koperasi (Rp. Juta)	
		2017	2016
1	Kab. Agam	428.156,55	408.868,27
2	Kab. Pasaman	118.486,87	113.126,35
3	Kab. Pasaman Barat	146.276,40	228.121,89
4	Kab. Solok	254.116,51	239.985,13
5	Kab. Solok Selatan	121.543,59	89.377,11
6	Kab. Padang Pariaman	67.981,98	60.526,14
7	Kab. Pesisir Selatan	151.432,07	158.964,94
8	Kab. Tanah Datar	180.073,17	179.989,61
9	Kab. Sijunjung	306.377,75	279.030,85
10	Kab. Dharmasraya	124.593,58	133.920,11
11	Kab. Kep. Mentawai	184.048,43	139.622,03
12	Kab. Kep. Mentawai	10.093,62	11.340,87
13	Kota Bukittinggi	261.786,17	245.977,19
14	Kota Padang	1.251.244,82	1.003.114,15
15	Kota Sawahlunto	77.138,81	74.568,93
16	Kota Padang Panjang	90.228,18	83.870,93
17	Kota Solok	98.788,33	94.189,67
18	Kota Payakumbuh	208.906,31	138.773,77
19	Kota Pariaman	61.203,68	55.748,06
	Jumlah	4.142.476,83	3.739.116,00

Meningkatnya nilai aset koperasi berdasarkan salah satu inikatornya adalah meningkatnya jumlah anggota koperasi dari 547.784 orang pada tahun 2016 menjadi 589.070 pada tahun 2017, sehingga persentase pertumbuhan peningkatan sebesar 7,5% dan tindak lanjut rekomendasi pengawasan dan pemeriksaan semula 50 koperasi dan dapat realisasinya 90 koperasi dan jumlah koperasi aktif pada tahun 2016 sebanyak 2.891 unit menjadi 2.744 unit pada tahun 2017 sehingga penurunan persentase capaian sebesar 5%. Meskipun jumlah koperasi aktif menurun tetapi dengan adanya tindak lanjut rekomendasi pengawasan dan pemeriksaan berdampak pada peningkatan SHU, dari Rp. 202.639.880.000,- pada tahun 2016, menjadi Rp 248.175.180.000,- pada tahun 2017 sehingga meningkat sebesar 22,47%. Meningkatnya nilai SHU mempunyai hubungan signifikan dengan meningkatnya nilai aset.

Dalam rangka peningkatan asset koperasi, Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Barat juga telah melakukan pengawasan terhadap kelembagaan dan usaha koperasi. Dari hasil pengawasan tersebut, ada 10 (sepuluh) koperasi terbaik yang telah meningkat kelembagaannya setelah dilakukan pengawasan, koperasi tersebut adalah : 1) Koperasi Bina Usaha Kab. Dharmasraya; 2) KSU Berkat Kab. Lima Puluh Kota; 3) KSU Sutera Ketinggian Kab. Lima Puluh Kota; 4) KSP Talago II Tj. Pati Kab. Lima Puluh Kota; 5) KSU IWAPI Payakumbuh.

2) Meningkatnya nilai omset koperasi

Nilai omset koperasi diukur berdasarkan volume usaha dalam 1 tahun. Volume usaha koperasi adalah pertumbuhan volume usaha koperasi sektor riil dan volume usaha simpan pinjam. Volume usaha sector riil merupakan jumlah penjualan / pendapatan dari sector riil sedangkan volume usaha simpan pinjam dihitung berdasarkan jumlah upinjam dari anggota koperasi. Pada tahun 2017 volume usaha koperasi adalah

sebesar Rp. 5.106.216.630.000. Apabila dibandingkan dengan volume usaha tahun 2016 sebesar Rp. 4.745.847.630.000 terdapat peningkatan yang cukup signifikan yaitu sebesar 7,59%. Peningkatan volume usaha ini merupakan peningkatan volume usaha koperasi di Kabupaten/Kota, dimana pada tahun 2017 sektor pertanian seperti jagung, sawit dan karet mengalami peningkatan harga. Selain itu pada usaha simpan pinjam terjadi pula peningkatan jumlah pinjaman dari anggota koperasi. Pertumbuhan volume usaha koperasi di kabupaten/kota adalah sebagai berikut :

Tabel 8
Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi
Kabupaten/Kota

No	Kabupaten/Kota	Total Omset Koperasi (Rp. Juta)	
		2017	2016
1	Kab. Agam	354.295,28	296.308,56
2	Kab. Pasaman	136.528,67	135.298,80
3	Kab. Pasaman Barat	320.510,75	268.101,25
4	Kab. 50 Kota	195.356,77	184.069,60
5	Kab. Solok	125.051,39	80.062,45
6	Kab. Solok Selatan	92.269,85	75.468,24
7	Kab. Padang Pariaman	159.908,46	158.553,43
8	Kab. Pesisir Selatan	242.442,19	266.784,38
9	Kab. Tanah Datar	285.357,06	489.090,23
10	Kab. Sijunjung	126.063,77	455.133,81
11	Kab. Dharmasraya	288.549,54	359.441,30
12	Kab. Kep. Mentawai	3.99,57	3.715,95
13	Kota Bukittinggi	480.321,64	170.635,86
14	Kota Padang	1.860.549,57	1.333.361,61
15	Kota Sawahlunto	99.820,47	110.792,26
16	Kota Padang Panjang	71.670,70	65.834,30
17	Kota Solok	58.953,04	102.904,90
18	Kota Payakumbuh	152.814,59	148.140,52
19	Kota Pariaman	51.755,34	42.150,18
	Jumlah	5.106.216,63	4.745.847,63

Pada tahun 2016 volume usaha sector riil berjumlah sebesar Rp. 1.595.689.770.000 dan pada tahun 2017 sebesar Rp. 1.550.856.250.000, dan persentase pertumbuhan sebesar 6,6 %, Untuk pertumbuhan volume usaha simpan pinjam pada tahun 2016 sebesar Rp 3.150.157.680,- dan pada tahun 2017 sebesar Rp 3.569.229.070,- sehingga terjadi pertumbuhan sebesar 13,30 %. untuk indikator permodalan usaha pada tahun 2016 sebesar Rp 3.750.833.080, menjadi Rp 4.277.051.470 pada tahun 2017, mencapai pertumbuhan sebesar 14,02%.

Nilai omset koperasi diukur berdasarkan jumlah pendapatan koperasi dan usahanya. Untuk usaha simpan pinjam nilai omset diukur berdasarkan jumlah pinjaman anggota kepada koperasi. Sedangkan untuk sector lainnya diukur berdasarkan pendapatan dari usaha tersebut, misalnya pendapatan dari waserda, pendapatan dari usaha pertanian, dan lain-lain.

Koperasi yang bergerak di usaha simpan pinjam pada tahun 2017 berjumlah 2,817 unit. Apabila dibandingkan dengan tahun 2016 dimana volume usaha koperasi berjumlah sebesar Rp. 3.069.616.586 pada tahun 2017 meningkat menjadi Rp. 3.392.441.600. Peningkatan volume usaha simpan pinjam disebabkan oleh beberapa faktor yaitu :

- Melakukan rapat koordinasi dengan koperasi terkait perkembangan volume usaha koperasi
- Melakukan pembinaan terhadap koperasi untuk meningkatkan usaha
- Membantu koperasi meningkatkan modal usaha melalui lembaga keuangan dan non keuangan seperti LPDB.

Selain itu volume usaha koperasi sektor riil juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pada tahun 2016 jumlah volume usaha koperasi sector riil sebesar Rp. 1.702.471.764, meningkat di tahun 2017 sebesar Rp. 1.813.987.810. Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat terus

berupaya untuk meningkatkan volume usaha koperasi sector riil ini. Upaya-upaya yang telah dilakukan adalah :

- a) Meningkatkan daya saing koperasi sector pertanian,
Langkah-langkah yang dilakukan dalam peningkatan daya saing koperasi sector pertanian ini adalah : 1) meningkatkan koordinasi dengan pengurus koperasi untuk mencari peluang peningkatan daya saing koperasi; 2) melakukan bimbingan teknis untuk pengembangan usaha koperasi; 3) bersinergi dengan OPD lain.
- b) Revitalisasi usaha KUD melalui : a) melakukan rapat koordinasi dengan pengurus KUD untuk mencari peluang dan peningkatan usaha; b) Bimbingan teknis untuk pengembangan usaha seperti budi daya ternak sapi bagi koperasi yang mengelola ternak sapi; c) koordinasi dengan OPD serta pihak lainnya yang terkait dengan revitalisasi usaha KUD.
- c) Peningkatan usaha ritel koperasi melalui : a) melakukan rapat koordinasi dengan pengurus koperasi yang bergerak dibidang usaha ritel/waserta; b) bimbingan teknis pengelolaan ritel serta sharing informasi ke koperasi pengelola Ritel di Yogyakarta; c) meningkatkan performance koperasi dengan bermitra dengan usaha sejenis/distributor seperti Minang Mart
- d) Pengembangan Produk Unggulan Daerah (PUD) melalui pendekatan One Village One Product (OVOP), melalui : a) melakukan rapat koordinasi dengan koperasi pengelola PUD untuk mencari peluang peningkatan usaha; b) memberikan pendampingan yang berasal dari tenaga ahli Universitas Andalas padang; c) melakukan bimtek SKU, manajemen dan pemasaran online; d) Fasilitasi pemasaran dan sharing informasi ke Jawa Tengah.

3) Meningkatnya skala usaha UKM binaan

Meningkatnya skala usaha UKM binaan disebabkan karena indikator peningkatan usaha kecil sebesar 670 UKM menjadi usaha menengah

sebesar 21 UKM pada tahun 2016 menjadi 812 UKM usaha kecil dan mencapai usaha menengah sebanyak 30 UKM pada tahun 2017, peningkatan sebesar 1,34 %. Selanjutnya indikator pendukung lainnya adalah jumlah kemitraan usaha UKM pada tahun 2016 belum terpenuhi, namun pada tahun 2017 mencapai 7 kemitraan usaha UKM yakni dengan PT. Grafika, PT Minang Mart, Outlet Belanja PT Semen Padang, PT Transmart, Christine Hakim, IPEMI Malaysia, dan Batam. Pada indikator peningkatan unggulan kompetitif terstandarisasi untuk sertifikasi halal pada tahun 2016 sebanyak 15 UKM pada tahun 2017 mencapai 10 UKM, pendaftaran merk pada tahun 2016 sebanyak 40 UKM, pada tahun 2017 sebanyak 90 UKM

Dalam rangka mendorong perkembangan usaha Kecil menjadi usaha Menengah, Pemerintah Propinsi Sumatera Barat melalui Dinas Koperasi, UKM berupaya untuk mendorong agar UKM tersebut dapat berkembang. Upaya – upaya yang telah dilaksanakan adalah :

1. Pembinaan kelembagaan di lokasi sentra, pengembangan UKM difokuskan pada lokasi-lokasi sentra. Pemerintah Kabupaten/Kota diharapkan agar dapat menetapkan sentra – sentra UKM melalui Keputusan Kepala Daerah
2. Penumbuhan Wirausaha Baru melalui program kegiatan penumbuhan dan pembinaan wira usaha. Jenis wira usaha yang dikembangkan dan dibina adalah yang bergerak dibidang usaha kerajinan, aneka usaha makanan ringan, jasa usaha dan PKL. Pada tahun 2017 jumlah wira usaha/UMKM yang dibina adalah sebanyak 1.647.
3. Peningkatan akses pembiayaan UMKM ke Perbankan dan Lembaga Non Bank. Dalam kegiatan ini UMKM difasilitasi tentang tata cara skim kredit KUR/PKBL/CSR kemitraan dalam pengelolaan usaha. Pada tahun 2017 realisasi penyaluran KUR dari Bank Pelaksana KUR yaitu BRI, BNI, Bank Mandiri dan Bank Nagari adalah sebesar RP. 2.691.716.400.000,- dengan jumlah UMKM/debitur sebanyak 94.348 debitur.

Pemasaran produk UMKM melalui pendaftaran merk peningkatan keamanan produk makanan agar lebih menyakinkan konsumen melalui sertifikasi halal. Dinas Koperasi, UKM telah memfasilitasi UKM untuk mendapatkan sertifikasi halal dan pendaftaran merk dari tahun 2015 sampai 2017 dengan total UMKM sebanyak 205 UKM.

B. Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan beberapa Tahun Terakhir

Sasaran meningkatnya yang didukung oleh 3 (tiga) indikator, yakni 1) meningkatnya nilai asset koperasi; 2) meningkatnya nilai omset koperasi; 3) meningkatnya skala usaha UKM binaan. Sasaran dan indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun lalu atau tahun-tahun sebelumnya karena merupakan sasaran dan indikator baru terkait dengan adanya hasil evaluasi Kemen PAN dan RB terhadap SAKIP Provinsi Sumatera Barat.

Sasaran 2	Meningkatnya kualitas tata kelola organisasi
------------------	---

A. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja

1. Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja

Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat tahun 2016 adalah sebesar 64,24. Kategori B dengan asumsi Baik. Aspek yang dinilai dalam evaluasi akuntabilitas kinerja terdiri atas komponen perencanaan, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal serta pencapaian sasaran/kinerja organisasi. Dari hasil evaluasi Inspektorat terhadap bobot kinerja dari lima komponen tersebut adalah :

Tabel 9
Pembobotan Nilai Evaluasi Kinerja
Tahun 2017

No	Komponen	Bobot	Hasil Penilaian
1	Perencanaan Kinerja	30%	23,71%
2	Pengukuran Kinerja	25%	15,49%
3	Pelaporan Kinerja	15%	9,13%
4	Evaluasi Internal	10%	6,16%
5	Pencapaian sasaran/kinerja organisasi	20%	9,75%

Adanya predikat nilai B dari hasil kajian Indeks Kepuasan Masyarakat berdasarkan Permen PAN & RB No. 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh LPPM Universitas Andalas pada tahun 2017.

2. Capaian Fisik Pengelolaan Program/Kegiatan

Capaian fisik pengelolaan program/kegiatan tahun 2017 sebesar 99,97% . Berdasarkan Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi, UKM dengan Gubernur Sumatera Barat Tahun 2017 target capaian fisik pengelolaan program/kegiatan adalah 100%. Dengan demikian realisasi capaian fisik adalah sebesar 99,97%.

Apabila dibandingkan dengan realisasi capaian fisik program/kegiatan tahun 2016 sebesar 97,19%, capaian fisik tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 2,78%.

3. Capaian Realisasi Keuangan Pengelolaan Program/Kegiatan

Capaian realisasi keuangan pengelolaan program/kegiatan adalah sebesar 90,59%. Apabila dibandingkan dengan target sesuai Perjanjian Kinerja dengan Gubernur Sumatera Barat maka capaian realisasi keuangan pengelolaan program/kegiatan adalah sebesar 95,36%, dengan rincian capaian realisasi belanja tidak langsung sebesar 93,69% dan capaian realisasi belanja langsung urusan sebesar 89,23%.

B. Analisa Penyebab Peningkatan/Penurunan Realisasi dari Target

1) Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja

Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja memiliki peringkat yang sama baik yang dilaksanakan oleh Inspektorat maupun LPPM Universitas Andalas yang didukung oleh indikator kinerja pencapaian sasaran lainnya yakni capaian realisasi fisik, pada tahun 2016 sebesar 96,91 % dan pada tahun 2017 realisasi fisik sebesar 99,96 %, realisasi capaian kinerja tahun lalu sebesar 3,15% dan selanjutnya indikator capaian realisasi keuangan pada tahun 2016 sebesar

88,27% dan realisasi pada tahun 2017 sebesar 89,23 % sehingga capaian kinerja tahun lalu sebesar 1,09%

2. **Capaian Fisik Pengelolaan Program/Kegiatan**

Capaian fisik pengelolaan program/kegiatan tahun 2017 sebesar 99,97% . Berdasarkan Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi, UKM dengan Gubernur Sumatera Barat Tahun 2017 target capaian fisik pengelolaan program/kegiatan adalah 100%. Dengan demikian realisasi capaian fisik adalah sebesar 99,97%.

Apabila dibandingkan dengan realisasi capaian fisik program/kegiatan tahun 2016 sebesar 97,19%, capaian fisik tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 2,78%. Tidak tercapainya realisasi fisik kegiatan sebesar 100% disebabkan karena adanya kegiatan yang pelaksanaannya hanya sebesar 70% yaitu kegiatan Penyediaan Jasa Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur. Hal ini disebabkan karena kegiatan wirid gabungan di Dinas bertepatan pelaksanaannya dengan wirid gabungan di Mesjid Raya Sumatera Barat yang diikuti oleh seluruh OPD.

Tabel 10
Realisasi Fisik Program/Kegiatan
Tahun 2017

KODE KEGIATAN	JENIS BELANJA / PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI FISIK
1.15.1.15.01.15.03.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	7,039,592,045.00	100.00
1.15.1.15.01.15.03.5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	5,321,634,570.00	100.00
1.15.1.15.01.15.03.5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	1,717,717,495.00	100.00
1.15.1.15.01.15.03.5.1.1.04	Insentif Pemungutan	240,000.00	0.00
1.15.1.15.01.5.2	BELANJA LANGSUNG	16,045,483,226.00	99.96
	BELANJA LANGSUNG POKOK	5,229,914,626.00	99.88
	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	2,100,470,426.00	99.70
1.02.1.02.11.01.01.01	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	36,400,000.00	100.00
1.02.1.02.11.01.01.02	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	271,400,000.00	100.00

KODE KEGIATAN	JENIS BELANJA / PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI FISIK
1.02.1.02.11.01.01.08	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN, PENGAMANAN DAN SOPIR KANTOR	635,270,980.00	100.00
1.02.1.02.11.01.01.10	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	85,558,246.00	100.00
1.02.1.02.11.01.01.11	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	74,754,200.00	100.00
1.02.1.02.11.01.01.12	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	35,000,000.00	100.00
1.02.1.02.11.01.01.14	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	20,000,000.00	100.00
1.02.1.02.11.01.01.16	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	72,800,000.00	100.00
1.02.1.02.11.01.01.17	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE DALAM DAERAH DAN KE LUAR DAERAH	600,687,000.00	100.00
1.02.1.02.11.01.01.18	PENYEDIAAN JASA INFORMASI, DOKUMENTASI DAN PUBLIKASI	247,500,000.00	100.00
1.02.1.02.11.01.01.19	PENYEDIAAN JASA PEMBINAAN MENTAL DAN FISIK APARATUR	21,100,000.00	70.00
1.02.1.02.11.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	2,216,563,000.00	100.00
1.02.1.02.11.01.02.05	PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	390,338,000.00	100.00
1.02.1.02.11.01.02.07	PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR	60,190,000.00	100.00
1.02.1.02.11.01.02.08	PENGADAAN MEUBELEUR	1,482,360,000.00	100.00
1.02.1.02.11.01.02.17	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	58,000,000.00	100.00
1.02.1.02.11.01.02.19	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	100,000,000.00	100.00
1.02.1.02.11.01.02.22	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MEUBELEUR	10,675,000.00	100.00
1.02.1.02.11.01.02.23	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR	65,000,000.00	100.00
1.02.1.02.11.01.02.25	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA INSTALASI DAN JARINGAN	50,000,000.00	100.00
1.02.1.02.11.01.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	71,425,200.00	100.00
1.02.1.02.11.01.03.02	PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA KELENGKAPANNYA	71,425,200.00	100.00
1.02.1.02.11.01.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	113,492,000.00	100.00
1.02.1.02.11.01.05.03	BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	113,492,000.00	100.00

KODE KEGIATAN	JENIS BELANJA / PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI FISIK
1.02.1.02.11.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	363,276,000.00	100.00
1.02.1.02.11.01.06.01	PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	69,176,000.00	100.00
1.02.1.02.11.01.06.04	PENATAUSAHAAN KEUANGAN SKPD	294,100,000.00	100.00
1.02.1.02.11.01.07	PROGRAM PERENCANAAN, PENGELOLAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KEGIATAN ASSET	364,688,000.00	100.00
1.02.1.02.11.01.07.01	PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	181,912,000.00	100.00
1.02.1.02.11.01.07.02	MONITORING DAN EVALUASI PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD	95,150,000.00	100.00
	PENGELOLAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN ASSET SKPD	87,626,000.00	100.00
	BELANJA LANGSUNG URUSAN	10,815,568,600.00	100.00
1.02.1.02.11.01.10	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI	2,108,245,700.00	100.00
1.02.1.02.11.01.10.01	PENILAIAN KOPERASI BERPRESTASI/KOPERASI AWARD	158,184,700.00	100.00
1.02.1.02.11.01.10.02	PEMBAHARAN KOPERASI TIDAK AKTIF	110,000,000.00	100.00
1.02.1.02.11.01.10.03	PEMASYARAKATAN PERKOPERASIAN BAGI PEMANGKU KEPENTINGAN DAN MASYARAKAT	92,593,500.00	100.00
1.02.1.02.11.01.10.04	REVITALISASI KELEMBAGAAN KOPERASI	329,868,600.00	100.00
1.02.1.02.11.01.10.05	SOSIALISASI PERKOPERASIAN DI LOKASI TMMD/N	48,130,400.00	100.00
1.02.1.02.11.01.10.06	SOSIALISASI DAN PENINGKATAN PERAN KOPERASI DALAM PENGEMBANGAN KELOMPOK USAHA STRATEGI	145,234,500.00	100.00
1.02.1.02.11.01.10.07	PELATIHAN BISNIS PLAN BAGI KOPERASI	124,012,000.00	100.00
1.02.1.02.11.01.10.08	PELATIHAN AKUNTANSI BAGI PENGURUS / PENGELOLA KOPERASI	400,000,000.00	100.00
1.02.1.02.11.01.10.09	PELATIHAN AKUNTANSI BAGI PENGELOLAAN KEUANGAN USAHA SIMPAN PINJAM KOPERASI (DAK)	271,915,000.00	100.00
1.02.1.02.11.01.10.10	PELATIHAN PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DAN USAHA KOPERASI SEKTOR RIIL (DAK)	155,973,000.00	100.00
1.02.1.02.11.01.10.11	PELATIHAN PELAKSANAAN RAPAT ANGGOTA TAHUNAN (RAT) BAGI PENGURUS KOPERASI (DAK)	272,334,000.00	100.00
1.02.1.02.11.01.11	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN DAYA SAING KOPERASI	3,874,168,900.00	100.00
1.02.1.02.11.01.11.01	PEMBINAAN PENINGKATAN DAYA SAING KOPERASI /KUD SEKTOR PERTANIAN	110,000,000.00	100.00
1.02.1.02.11.01.11.02	REVITALISASI USAHA KOPERASI PERTANIAN /KUD	125,000,000.00	100.00
1.02.1.02.11.01.11.03	PENINGKATAN USAHA RETAIL KOPERASI	150,000,000.00	100.00
1.02.1.02.11.01.11.04	KOORDINASI PEMBINAAN USAHA KOPERASI PASAR (KOPPAS) DAN PENGELOLA PASAR RAKYAT	81,071,300.00	100.00
1.02.1.02.11.01.11.05	PENGEMBANGAN PRODUK Unggulan Daerah Dengan Pendekatan Dengan One Village One Product Melalui Koperasi	330,000,000.00	100.00

KODE KEGIATAN	JENIS BELANJA / PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI FISIK
1.02.1.02.11.01.11.06	PENGEMBANGAN USAHA KOPERASI MELALUI GERAKAN MASYARAKAT SADAR KOPERASI (GEMASKOP)	971,850,000.00	100.00
1.02.1.02.11.01.11.07	PENINGKATAN DAN EVALUASI PEMODALAN KOPERASI	413,675,000.00	100.00
1.02.1.02.11.01.11.08	PENINGKATAN PERAN USAHA SIMPAN PINJAM KOPERASI POLA SYARIAH	100,000,800.00	100.00
1.02.1.02.11.01.11.09	PEMBINAAN PELAKSANAAN USAHA SIMPAN PINJAM KOPERASI	100,068,700.00	100.00
1.02.1.02.11.01.11.10	PEMBINAAN DAN PENGAWASAN USAHA SIMPAN PINJAM KOPERASI	535,521,000.00	100.00
1.02.1.02.11.01.11.11	PEMBINAAN DAN PELAKSANAAN PENILAIAN KESEHATAN USAHA SIMPAN PINJAM KOPERASI	99,749,100.00	100.00
1.02.1.02.11.01.11.12	PELATIHAN BAGI DEWAN PENGAWASAN SYARIAH KOPERASI (DAK)	195,763,000.00	100.00
1.02.1.02.11.01.11.13	PELATIHAN PENINGKATAN KAPASITAS DAN KETERAMPILAN BAGI MANAGER/PENGELOLA USAHA SIMPAN PINJAM KOPERASI (DAK)	206,547,000.00	100.00
1.02.1.02.11.01.11.14	PELATIHAN PENGEMBANGAN USAHA BAGI MPENGELOLA TEMPAT PRAKTEK KEGIATAN USHA (TPKU) PADA PENDIDIKAN PEDESAAN (DAK)	154,155,000.00	100.00
1.02.1.02.11.01.11.15	PELATIHAN PENINGKATAN PENGELOLOAAN RITEL/WASERDA KOPERASI (DAK)	195,000,000.00	100.00
1.02.1.02.11.01.11.16	PELATIHAN MANAJEMEN DAN PENGEMBANGAN USAHA BAGI KOPERASI (DAK)	105,768,000.00	100.00
1.02.1.02.11.01.12	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN DAYA SAING UMKM	4,833,154,000.00	100.00
1.02.1.02.11.01.12.01	SOSIALISASI DAN KOORDINASI PENDAFTARAN MERK DAN SERTIFIKAT HALAL	150,000,000.00	100.00
1.02.1.02.11.01.12.02	PELATIHAN MANGEMEN USAHA BAGI UMK KAWASAN WISATA	125,748,000.00	100.00
1.02.1.02.11.01.12.03	PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN BAGI KOPERASI DAN UMKM	570,403,000.00	100.00
1.02.1.02.11.01.12.04	PENINGKATAN GERAKAN TERPADU PENSEJAHTERAAN UMKNM SUMATERA BARAT	160,000,000.00	100.00
1.02.1.02.11.01.12.05	PARTISIPASI PROMOSI PRODUK UMKM	210,000,000.00	100.00
1.02.1.02.11.01.12.07	PENYUSUNAN DATA BASED UMKM MAKANAN DAN MINUMAN UNGGULAN SUMATERA BARAT	47,110,000.00	100.00
1.02.1.02.11.01.12.08	PERKUATAN PRODUK UMKM	390,000,000.00	100.00
1.02.1.02.11.01.12.09	PEMBINAAN DAN PEGEMBANGAN KELEMBAGAAN DI LOKASI SENTRA	70,000,000.00	100.00
1.02.1.02.11.01.12.10	PENGEMBANGAN UMKM KERAJINAN UNGGULAN SUMATERA BARAT	600,000,000.00	100.00
1.02.1.02.11.01.12.11	PENINGKATAN AKSES PEMBIAYAAN UMKM KE PERBANKKAN DAN LEMBAGA NON PERBANKKAN	59,348,000.00	100.00
1.02.1.02.11.01.12.13	PELATIHAN PENGOLAHAN PANGAN BERBASIS UMBI-UMBIAN DAN PISANG BAGI UMKM (DAK)	452,863,000.00	100.00
1.02.1.02.11.01.12.14	PELATIHAN PENGEMBANGAN PEMASARAN BERBASIS IT (DAK)	155,208,000.00	100.00
1.02.1.02.11.01.12.15	PELATIHAN KEAMANAN PANGAN BAGI UMKM (DAK)	194,813,000.00	100.00
1.02.1.02.11.01.12.16	PELATIHAN PENINGKATAN TEKNIK KOMUNIKASI PEMASARAN DI KAWASAN WISATA (DAK)	155,358,000.00	100.00
1.02.1.02.11.01.12.17	PELATIHAN TEKNIS PENGEMBANGAN USAHA BAGI UMK DI KAWASAN WISATA (DAK)	402,718,000.00	100.00
1.02.1.02.11.01.12.18	MONITORING DAN EVALUASI PEMBINAAN TENAGA PENDAMPING (DAK)	1,081,585,000.00	100.00

3. Capaian Realisasi Keuangan Pengelolaan Program/Kegiatan

Capaian realisasi keuangan pengelolaan program/kegiatan adalah sebesar 90,59%. Apabila dibandingkan dengan target sesuai Perjanjian Kinerja dengan Gubernur Sumatera Barat maka capaian realisasi keuangan pengelolaan program/kegiatan adalah sebesar 95,36%, dengan rincian capaian realisasi belanja tidak langsung sebesar 93,69% dan capaian realisasi belanja langsung urusan sebesar 89,23%.

3.3. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA SAMPAI DENGAN TAHUN INI DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH YANG TERDAPAT DALAM DOKUMEN PERENCANAAN STRATEGIS ORGANISASI

Terkait dengan adanya revisi terhadap Rencana Strategis Dinas Koperasi, UMKM Tahun 2016-2021, terdapat penyesuaian indikator kinerja yang semula berorientasi output menjadi indikator kinerja yang berorientasi outcome sesuai dengan arahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB, dengan rincian sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel. 11

Pencapaian Sasaran Strategis sesuai Target Jangka Menengah Yang terdapat dalam dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

	Sasaran Stretegis	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya peran koperasi dan UKM dalam pertumbuhan ekonomi daerah	Meningkatnya nilai asset koperasi	%	8,50	10,79	126,94
		Meningkatnya nilai omset koperasi	%	7,50	7,59	101,2
		Meningkatnya skala usaha UKM binaan	%	1,20	1,34	111,67
2	Meningkatnya kualitas tata kelola organisasi	Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja	kategori	B	B	100%
		Capaian fisik pengelolaan program/kegiatan	%	100%	99,97%	99,97%
		Capaian realisasi keuanganpengelolaan program/kegiatan	%	95%	90,59%	95,36%

Untuk beberapa sasaran dan indikator kinerja lainnya perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi, sebagai berikut:

Sasaran 1. Meningkatnya peranan koperasi dan UKM dalam pertumbuhan ekonomi daerah :

1. Meningkatnya nilai asset koperasi dengan target sebesar 8,5% terealisasi sampai tahun ini sebesar 14,03% dengan capaian sebesar 165%, jika dibandingkan dengan target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra capaian kinerja sangat baik.
2. Meningkatnya nilai omset koperasidengan target sebesar 7,5% terealisasi sampai tahun ini sebesar 8,89% dengan capaian sebesar 118,53%, jika dibandingkan dengan target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra capaian kinerja sangat baik.
3. Merningkatnya skala usaha UKM binaan dengan target sebesar 1,2% terealisasi sampai tahun ini sebesar 1,34% dengan capaian sebesar 111,67%, jika dibandingkan dengan target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra capaian kinerja sangat baik.

Sasaran 2. Meningkatnya kualitas tata kelola organisasidengan indikator:

1. Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja dengan target kategori B terealisasi B dengan capaian sebesar 100%, jika dibandingkan dengan target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra capaian kinerja baik.
2. Capain fisik pengelolaan program/kegiatan dengan target sebesar 100% terealisasi sampai tahun ini sebesar 99,97% dengan capaian sebesar 99,97%, jika dibandingkan dengan target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra capaian kinerja baik

3. Capaian realisasi keuangan pengelolaan program/kegiatan dengan target sebesar 95% terealisasi sampai tahun ini sebesar 90,59% dengan capaian sebesar 95,36%, jika dibandingkan dengan target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra capaian kinerja sangat baik.

3.4. EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Koperasi,UKM Provinsi Sumatera Barat telah dilakukan efisiensi terhadap penggunaan sumber daya baik sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana. Pada tahun 2017 jumlah sumber daya manusia/pegawai sebanyak 75 orang yang terdiri dari 10 orang berpendidikan S2, 27 orang berpendidikan S1, 5 orang pendidikan D3, 33 orang berpendidikan SMA, 1 orang berpendidikan SMP, 1 orang berpendidikan SD.

3.5. ANALISA PROGRAM DAN KEGIATAN PENUNJANG PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2017

Efisiensi sumberdaya sarana dan prasarana untuk mendukung pencapaian sasaran strategis pada tahun 2017 antara lain berupa penggunaan barang milik daerah seperti tanah sebanyak 5 unit, bangunan sebanyak 12 unit, kendaraan dinas sebanyak 5 unit, peralatan kantor sebanyak 268 unit (meja dan kursi kerja, AC, computer, printer, filing cabinet, lemari, laptop, kursi dan mejha rapat, LCD proyektor, mesin tik, genset, pompa air, brangkas, kulkas, wirelees, sound system)

Pada tahun 2017 program kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran dan indikator dalam perjanjian kinerja adalah :

Sasaran 1 : Meningkatnya peran koperasi dan UKM dalam pertumbuhan ekonomi daerah

Untuk menunjang pencapaian sasaran meningkatnya peran koperasi dan UKM dalam pertumbuhan ekonomi daerah, pada tahun 2017 sesuai dengan

Rencana Strategis telah ditetapkan indikator kinerja dengan program dan kegiatan sebagai berikut:

a) Indikator ;meningkatnya nilai asset koperasi

Indikator meningkatnya nilai asset koperasididukung oleh *Program Peningkatan Kulaitas Kelembagaan Koperasi, dengan kegiatan:*

- 1) Penilaian Koperasi Berprestasi/Koperasi Award
- 2) Pembenahan Koperasi Tidak Aktif
- 3) Pemasyarakatan Perkoperasian Bagi Pemangku Kepentingan Dan Masyarakat
- 4) Revitalisasi Kelembagaan Koperasi
- 5) Sosialisasi Perkoperasian Di Lokasi TMMD/N
- 6) Pelatihan Akuntansi Bagi Pengurus/Pengelola Koperasi
- 7) Sosialisasi Dan Peningkatan Peran Koperasi dalam Pengembangan Kelompok Usaha Strategi
- 8) Pelatihan Bisnis Plan Bagi Koperasi
- 9) Pelatihan Akuntansi Bagi Pengelolaan Keuangan Usaha Simpan Pinjam Koperasi(DAK)
- 10) Pelatihan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Usaha Koperasi Sektor Riil(DAK)
- 11) Pelatihan Pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan(RAT) Bagi Pengurus Koperasi(DAK)

b) Indikator ;Meningkatnya nilai omset koperasi

Indikator meningkatnya nilai omset koperasi, dengan programnya adalah Program Peningkatan dan Pengembangan Daya saing Koperasi, dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

- 1) PembinaanPeningkatan Daya Saing Koperasi/KUD Sektor Pertanian
- 2) Revitalitalisasi Usaha Koperasi Pertanian/KUD
- 3) Peningkata usaha Ritail Koperasi
- 4) Koordinasi Pembinaan Usaha Koperasi Pasar(koppas) Dan Pengelola Pasar Rakyat

- 5) Pengembangan Produk Unggulan Daerah Dengan Pendekatan Dengan One Village One Product Melalui Koperasi
- 6) Pengembangan Usaha Koperasi Melalui Gerakan Masyarakat sadar Koperasi(GEMASKOP)
- 7) Peningkatan Dan Evaluasi Pemodalan Koperasi
- 8) Peningkatan Peran Usaha Simpan Pinjam Koperasi Pola Syariah
- 9) Pembinaan Dan Pengawasan Usaha Simpan Pinjam Koperasi
- 10) Pembinaan dan Pelaksanaan Usaha Simpan Pinjam Koperasi
- 11) Pembinaan Dan Pelaksanaan Penilaian Kesehatan Usaha Simpan Pinjam koperasi
- 12) Pelatihan Bagi Dewan Pengawasan Syariah Koperasi(DAK)
- 13) Pelatihan Peningkatan Kapasitas Dan keterampilan Bagi Manager/Pengelola Usaha Simpan Pinjam Koperasi(DAK)
- 14) Pelatihan Pengembangan Usaha Bagi Pengelola Tempat Praktek Tempat Usaha Pada pendidikan Pedesaan
- 15) Pelatihan Peningkatan Pengelolaan Ritel/Waserda (DAK)
- 16) Pelatihan Manajemen dan Pengembangan Usaha bagi Koperasi (DAK)

c) Indikator:Meningkatnya skala usaha UKM binaan

Indikator ini dicapai melalui Program Peningkatan dan Pengembangan DayaSaing UMKMdengan kegiatan pendukung sebagai berikut:

- 1) Sosialisasi dan Koordinasi Pendaftaran Merk dan Sertifikat Halal dan PIRT
- 2) Partisipasi Promosi Produk UMKM
- 3) Pengembangan Kerajinan Unggulan Sumatera Barat
- 4) Perkuatan produk UMKM
- 5) Pembinaan Dan Pengembangan Kelembagaan Di Lokasi Sentra
- 6) Peningkatan akses pembiayaan UMKM ke Perbankan dan Lembaga Non Bank
- 7) Pelatihan Managemen Usaha Bagi UMK Kawasan wisata
- 8) Pelatihan Kewirausahaan Bagi Koperasi UMKM

- 9) Peningkatan Gerakan Terpadu Pensejahteraan UMKM Sumatera Barat
- 10) Penyusunan Data Base UMKM Makanan Dan Minuman Unggulan Sumatera Barat
- 11) Pelatihan Teknis Pengembanganga Usaha Bagi UMK di Kawasan Wisata (DAK)
- 12) Pelatihan Pengembangan Pemasaran Berbasis IT(DAK)
- 13) Pelatihan Pengelolaan Pangan Berbasis Umbi-Umbian Dan Pisang Bagi UMKM(DAK)
- 14) Pelatihan Peningkatan Teknik Komunikasi Pemasaran Di kawasan wisata(DAK)
- 15) Pelatihan Pengamanan Keamanan Pangan Bagi UMKM
- 16) Minitoring Dan Evaluasi Pembinaan Tenaga Pendamping (DAK)

Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas tata kelola organisasi

Sasaran meningkatnya tata kelola organisasi didukung oleh indicator 1)nilai evaluasi akuntabilitas kinerja; 2) capaian fisik pengelolaan program/kegiatan; 3) capaian realisasi keuangan program/kegiatan. Capaian indicator ini didukung oleh beberapa program dan kegiatan Belanja Langsung Pokok, yaitu :

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan 11 kegiatan, yaitu :

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengaman dan Sopir Kantor
- Penyediaan Alat Tulis Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Penyediaan Makanan dan Minuman
- Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah
- Penyediaan Jasa Informasi, Dokumentasi dan Publikasi

- Penyediaan Jasa Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan 8 kegiatan, yaitu :**
 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional
 - Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
 - Pengadaan Meubelir
 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubeleur
 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi dan Jaringan
- 3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur , dengan kegiatannya adalah :**
 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
- 4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur , dengan kegiatan :**
 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
- 5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan, dengan kegiatan sebagai berikut :**
 - Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - Penatausahaan Keuangan SKPD
- 6) Program Perencanaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan, dengan kegiatan sebagai berikut :**
 - Penyusunan Perencanaan dan penganggaran SKPD
 - Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan SKPD
 - Pengelolaa, Pengawasan dan Pengendalian Asset SKPD

3.6. REALISASI DAN EFISIENSI ANGGARAN

Pada tahun anggaran tahun 2017 Dinas Koperasi, UKM melaksanakan program dan kegiatan baik dari alokasi APBD maupun dana dekonsentrasi APBN. Dalam alokasi anggaran APBD dituangkan dalam Belanja Langsung

Pokok yang terdiri atas 5 program dan 26 kegiatan, serta Belanja Langsung Urusan yang terdiri atas 3 program dan 43 kegiatan.

Alokasi anggaran pada DPA Dinas Koperasi dan UKM Propinsi Sumatera Barat sebesar Rp. 23.085.075.291,- terdiri dari :

- Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 7.039.592.062,- dengan realisasi sebesar Rp. 6.595.652.792,-
- Belanja Langsung sebesar Rp. 16.045.483.226,- dengan realisasi sebesar Rp. 14.317.191.961,-

Realisasi anggaran untuk mencapai sasaran adalah sebagai berikut:

Tabel 12
Realisasi Anggaran Per Sasaran

Kode Rekening	Sasaran/Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Sasaran 1 : Meningkatnya peran koperasi dan UKM dalam pertumbuhan ekonomi daerah			
1.02.1.02.11.01.10	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI	2.108.245.700	1.933.297.850	91.70
1.02.1.02.11.01.10.01	PENILAIAN KOPERASI BERPRESTASI/KOPERASI AWARD	158.184.700	146.784.750	92.79
1.02.1.02.11.01.10.02	PEMBENAHAN KOPERASI TIDAK AKTIF	110.000.000	95.324.150	86.66
1.02.1.02.11.01.10.03	PEMASYARAKATAN PERKOPERASIAN BAGI PEMANGKU KEPENTINGAN DAN MASYARAKAT	92.593.500	76.126.100	82.22
1.02.1.02.11.01.10.04	REVITALISASI KELEMBAGAAN KOPERASI	329.868.600	284.566.850	86.87
1.02.1.02.11.01.10.05	SOSIALISASI PERKOPERASIAN DI LOKASI TMMD/N	48.130.400	30.515.000	63.40
1.02.1.02.11.01.10.06	SOSIALISASI DAN PENINGKATAN PERAN KOPERASI DALAM PENGEMBANGAN KELOMPOK USAHA STRATEGI	145.234.500	127.829.000	88.02
1.02.1.02.11.01.10.07	PELATIHAN BISNIS PLAN BAGI KOPERASI	124.012.000	99.866.000	80.53
1.02.1.02.11.01.10.08	PELATIHAN AKUNTANSI BAGI PENGURUS / PENGELOLA KOPERASI	400.000.000	388.248.000	97.06
1.02.1.02.11.01.10.09	PELATIHAN AKUNTANSI BAGI PENGELOLAAN KEUANGAN USAHA SIMPAN PINJAM KOPERASI (DAK)	271.915.000	269.739.000	99.20
1.02.1.02.11.01.10.10	PELATIHAN PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DAN USAHA KOPERASI SEKTOR RIIL (DAK)	155.973.000	140.973.000	90.38
1.02.1.02.11.01.10.11	PELATIHAN PELAKSANAAN RAPAT ANGGOTA TAHUNAN (RAT) BAGI PENGURUS KOPERASI (DAK)	272.334.000	271.326.000	99.63
1.02.1.02.11.01.11	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN DAYA SAING KOPERASI	3.874.168.900	3.455.000.497	89.18
1.02.1.02.11.01.11.01	PEMBINAAN PENINGKATAN DAYA SAING KOPERASI / KUD SEKTOR PERTANIAN	110.000.000	98.567.000	89.61
1.02.1.02.11.01.11.02	REVITALISASI USAHA KOPERASI PERTANIAN / KUD	125.000.000	103.323.499	82.66
1.02.1.02.11.01.11.03	PENINGKATAN USAHA RITAIL KOPERASI	150.000.000	132.917.900	88.61
1.02.1.02.11.01.11.04	KOORDINASI PEMBINAAN USAHA KOPERASI PASAR (KOPPAS) DAN PENGELOLA PASAR RAKYAT	81.071.300	71.166.200	87.78
1.02.1.02.11.01.11.05	PENGEMBANGAN PRODUK UNGGULAN DAERAH DENGAN PENDEKATAN DENGAN ONE VILLAGE ONE PRODUCT MELALUI KOPERASI	330.000.000	309.566.600	93.81
1.02.1.02.11.01.11.06	PENGEMBANGAN USAHA KOPERASI MELALUI GERAKAN MASYARAKAT SADAR KOPERASI (GEMASKOP)	971.850.000	856.296.100	88.11
1.02.1.02.11.01.11.07	PENINGKATAN DAN EVALUASI PEMODALAN KOPERASI	413.675.000	354.134.700	85.61

Kode Rekening	Sasaran/Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.02.1.02.11.01.11.08	PENINGKATAN PERAN USAHA SIMPAN PINJAM KOPERASI POLA SYARIAH	100.000.800	80.083.200	80,08
1.02.1.02.11.01.11.09	PEMBINAAN PELAKSANAAN USAHA SIMPAN PINJAM KOPERASI	100.068.700	75.681.350	75,63
1.02.1.02.11.01.11.10	PEMBINAAN DAN PENGAWASAN USAHA SIMPAN PINJAM KOPERASI	535.521.000	499.957.548	93,36
1.02.1.02.11.01.11.11	PEMBINAAN DAN PELAKSANAAN PENILAIAN KESEHATAN USAHA SIMPAN PINJAM KOPERASI	99.749.100	98.395.400	98,64
1.02.1.02.11.01.11.12	PELATIHAN BAGI DEWAN PENGAWASAN SYARIAH KOPERASI (DAK)	195.763.000	194.453.000	99,33
1.02.1.02.11.01.11.13	PELATIHAN PENINGKATAN KAPASITAS DAN KETERAMPILAN BAGI MANAGER/PENGELOLA USAHA SIMPAN PINJAM KOPERASI (DAK)	206.547.000	144.525.000	69,97
1.02.1.02.11.01.11.14	PELATIHAN PENGEMBANGAN USAHA BAGI NPENGELOLA TEMPAT PRAKTEK KEGIATAN USHA (TPKU) PADA PENDIDIKAN PEDESAAN (DAK)	154.155.000	153.725.000	99,72
1.02.1.02.11.01.11.15	PELATIHAN PENINGKATAN PENGELOLOAN RITEL/WASERDA KOPERASI (DAK)	195.000.000	190.890.000	97,89
1.02.1.02.11.01.11.16	PELATIHAN MANAJEMEN DAN PENGEMBANGAN USAHA BAGI KOPERASI (DAK)	105.768.000	91.318.000	86,34
1.02.1.02.11.01.12	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN DAYA SAING UMKM	4.833.154.000	4.246.918.756	87,87
1.02.1.02.11.01.12.01	SOSIALISASI DAN KOORDINASI PENDAFTARAM MERK DAN SERTIFIKAT HALAL	150.000.000	135.616.400	90,41
1.02.1.02.11.01.12.02	PELATIHAN MANGEMEN USAHA BAGI UMK KAWASAN WISATA	125.748.000	101.901.000	81,04
1.02.1.02.11.01.12.03	PELATIHAN KEWIRUSAHAAN BAGI KOPERASI DAN UMKM	578.403.000	504.982.800	87,31
1.02.1.02.11.01.12.04	PENINGKATAN GERAKAN TERPADU PENSEJAHTERAAN UMKNM SUMATERA BARAT	160.000.000	136.926.499	85,58
1.02.1.02.11.01.12.05	PARTISIPASI PROMOSI PRODUK UMKM	210.000.000	179.506.502	85,48
1.02.1.02.11.01.12.07	PENYUSUNAN DATA BASED UMKM MAKANAN DAN MINUMAN UNGGULAN SUMATERA BARAT	47.110.000	43.471.200	92,28
1.02.1.02.11.01.12.08	PERKUATAN PRODUK UMKM	390.000.000	371.415.000	95,23
1.02.1.02.11.01.12.09	PEMBINAAN DAN PEGEMBANGAN KELEMBAGAAN DI LOKASI SENTRA	70.000.000	62.370.000	89,10
1.02.1.02.11.01.12.10	PENGEMBANGAN UMKM KERAJINAN UNGGULAN SUMATERA BARAT	600.000.000	412.559.555	68,76
1.02.1.02.11.01.12.11	PENINGKATAN AKSES PEMBIAYAAN UMKM KE PERBANKKAN DAN LEMBAGA NON PERBANKKAN	59.348.000	51.857.000	87,38

Kode Rekening	Sasaran/Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.02.1.02.11.01.12.13	PELATIHAN PENGOLAHAN PANGAN BERBASIS UMBI-UMBIAN DAN PISANG BAGI UMKM (DAK)	452,863,000	410,386,000	90.62
1.02.1.02.11.01.12.14	PELATIHAN PENGEMBANGAN PEMASARAN BERBASIS IT (DAK)	155,208,000	152,298,000	98.13
1.02.1.02.11.01.12.15	PELATIHAN KEAMANAN PANGAN BAGI UMKM (DAK)	194,813,000	190,968,000	98.03
1.02.1.02.11.01.12.16	PELATIHAN PENINGKATAN TEKNIK KOMUNIKASI PEMASARAN DI KAWASAN WISATA (DAK)	155,358,000	154,138,000	99.21
1.02.1.02.11.01.12.17	PELATIHAN TEKNIS PENGEMBANGAN USAHA BAGI UMK DI KAWASAN WISATA (DAK)	402,718,000	335,237,000	83.24
1.02.1.02.11.01.12.18	MONITORING DAN EVALUASI PEMBINAAN TENAGA PENDAMPING (DAK)	1,081,585,000	1,003,285,800	92.76
Sasaran 2 : Meningkatnya Tata Kelola Organisasi				
1.02.1.02.11.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	2,100,470,426	1,950,733,327	92.87
1.02.1.02.11.01.01.01	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	36,400,000	22,241,150	61.10
1.02.1.02.11.01.01.02	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	271,400,000	241,544,734	89.00
1.02.1.02.11.01.01.08	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN, PENGAMANAN DAN SOPIR KANTOR	635,270,980	609,429,891	95.93
1.02.1.02.11.01.01.10	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	85,558,246	84,876,200	99.20
1.02.1.02.11.01.01.11	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	74,754,200	74,582,500	99.77
1.02.1.02.11.01.01.12	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	35,000,000	34,505,000	98.59
1.02.1.02.11.01.01.14	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	20,000,000	13,410,000	67.05
1.02.1.02.11.01.01.16	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	72,800,000	56,438,500	77.53
1.02.1.02.11.01.01.17	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE DALAM DAERAH DAN KE LUAR DAERAH	600,687,000	580,855,352	96.70
1.02.1.02.11.01.01.18	PENYEDIAAN JASA INFORMASI, DOKUMENTASI DAN PUBLIKASI	247,500,000	222,400,000	89.86
1.02.1.02.11.01.01.19	PENYEDIAAN JASA PEMBINAAN MENTAL DAN FISIK APARATUR	21,100,000	10,450,000	49.53

Kode Rekening	Sasaran/Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.02.1.02.11.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	2.216.563.000	1.987.051.632	89.65
1.02.1.02.11.01.02.05	PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	390.338.000	366.620.000	93.92
1.02.1.02.11.01.02.07	PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR	60.190.000	50.631.000	84.12
1.02.1.02.11.01.02.08	PENGADAAN MEUBELEUR	1.482.360.000	1.326.480.000	89.48
1.02.1.02.11.01.02.17	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	58.000.000	56.654.900	97.68
1.02.1.02.11.01.02.19	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	100.000.000	84.529.732	84.53
1.02.1.02.11.01.02.22	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MEUBELEUR	10.675.000	6.350.000	59.48
1.02.1.02.11.01.02.23	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR	65.000.000	47.235.000	72.67
1.02.1.02.11.01.02.25	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA INSTALASI DAN JARINGAN	50.000.000	48.551.000	97.10
1.02.1.02.11.01.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	71.425.200	60.528.000	84.74
1.02.1.02.11.01.03.02	PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA KELENGKAPANNYA	71.425.200	60.528.000	84.74
1.02.1.02.11.01.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	113.492.000	68.147.809	60.05
1.02.1.02.11.01.05.03	BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	113.492.000	68.147.809	60.05
1.02.1.02.11.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	363.276.000	320.096.590	88.11
1.02.1.02.11.01.06.01	PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	69.176.000	60.831.900	87.94
1.02.1.02.11.01.06.04	PENATAUSAHAAN KEUANGAN SKPD	294.100.000	259.264.690	88.16
1.02.1.02.11.01.07	PROGRAM PERENCANAAN, PENGELOLAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KEGIATAN ASSET	364.688.000	295.417.500	81.01
1.02.1.02.11.01.07.01	PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	181.912.000	149.539.900	82.20
1.02.1.02.11.01.07.02	MONITORING DAN EVALUASI PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD	95.150.000	73.715.500	77.47
1.02.1.02.11.01.07.03	PENGELOLAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN ASSET SKPD	87.626.000	72.162.100	82.35

Dari tabel diatas dapat kami jelaskan efisensi yang dilakukan terhadap pencapaian sasaran dan indikator, adalah sebagai berikut:

1. **Sasaran Meningkatnya peran Koperasi dan UKM dalam pertumbuhan ekonomi daerah** didukung oleh 3 (tiga) program dengan 43 (empat puluh tiga) kegiatan. Dari pagu anggaran sebesar Rp. 10.815.568.600, terealisasi sebesar Rp. 9.635.217.103 dengan capaian realisasi sebesar 89,58%. Apabila dilihat dari capaian indikator dan dibandingkan dengan realisasi anggaran, terdapat efisiensi dalam penggunaan anggaran. Efisiensi anggaran adalah pada belanja perjalanan dinas dan pelaksanaan rapat dengan pembina di kabupaten/kota.
2. **Sasaran Meningkatnya tata kelola organisasi** didukung oleh 6 (enam) program dengan 26 (dua puluh enam) kegiatan. Dari pagu anggaran sebesar Rp. 5.229.914.626, terealisasi sebesar Rp. 4.681.974.858 dengan capaian realisasi sebesar 82,74%. Apabila dilihat dari capaian indikator dan dibandingkan dengan realisasi anggaran, terdapat efisiensi dalam penggunaan anggaran. Efisiensi anggaran adalah pada belanja perjalanan dinas, sisa tender, dan pemeliharaan yang direalisasikan sesuai kebutuhan.

Disamping itu pada tahun 2017 Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat juga mendapatkan alokasi anggaran Dekonsentrasi dari Kementerian Koperasi dan UKM RI. Alokasi anggaran Dekonsentrasi sebesar Rp. 1.673.624.00 yang dimanfaatkan untuk mendukung capaian program Kementerian Koperasi dan UKM RI yaitu Program Peningkatan Daya saing UMKM dan Koperasi.

Tabel 13
Realisasi Anggaran Dekonsentrasi Tahun 2017

PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT	Vol	SATUAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI			
				FISIK	%	KEUANGAN	
						Rp	%
Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi			1.673.624.000	100.00		1.562.311.249	93.35
a. Terlaksananya Dukungan Pemberdayaan KUKM di Daerah	10	dokumen	535.274.000	100.00		498.942.149	93.21
1 Pengembangan Data KUMKM			148.332.000	100.00		135.074.600	91.06
2 Perencanaan Program Kementerian Koperasi dan UKM			386.942.000	100.00		363.867.549	94.04
b. Pemberdayaan Pendamping KUKM di Daerah	82	orang	853.150.000	100.00		790.495.500	92.66
1 Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL)			692.000.000	100.00		635.576.250	91.85
2 Satuan Tugas Pengawas Koperasi			161.150.000	100.00		154.919.250	96.13
c. Fasilitas Pameran dan Promosi KUKM di Daerah	2	event	285.200.000	100.00		272.873.600	95.68
1 Fasilitas Pameran dan Promosi			285.200.000	100.00		272.873.600	95.68

Pencapaian indikator Kementerian Koperasi dan UKM di Provinsi Sumatera Barat melalui anggaran Dekonsentrasi adalah:

- 1) meningkatnya kontribusi UMKM dan Koperasi dalam Perekonomian
Indikator ini didukung dari kegiatan rapat Koordinasi Daerah, Rakornas, Rakortas, Rakor Data, penyediaan tenaga pendamping, satuan tugas pengawasan.
- 2) Meningkatnya daya saing UMKM
Indikator ini didukung melalui kegiatan fasilitasi pameran dan promosi seperti Bazar Ramadhan, Fasilitas Galeri Smesco

BAB IV

PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Laporan Kinerja disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas Koperasi, UKM Propinsi Sumatera Barat kepada pihak-pihak terkait atas capaian kinerja tahun 2017. Capaian kinerja berdasarkan sasaran strategis pada tahun 2017 sebagai berikut :

1. Meningkatnya peranan koperasi dan UKM dalam pertumbuhan ekonomi daerah :

1. Meningkatnya nilai asset koperasi dengan target sebesar 8,50% terealisasi sampai tahun ini sebesar 10.79% dengan capaian sebesar 126,94% **(sangat baik)**
2. Meningkatnya nilai omset koperasi dengan target sebesar 7,5% terealisasi sampai tahun ini sebesar 7,59% dengan capaian sebesar 101,2%, **(sangat baik)**
3. Merningkatnya skala usaha UKM binaan dengan target sebesar 1,2% terealisasi sampai tahun ini sebesar 1,34% dengan capaian sebesar 111,67% **(sangat baik)**

Sasaran 2. Meningkatnya kualitas tata kelola organisasi dengan indikator:

1. Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja dengan target kategori B terealisasi B dengan capaian sebesar 100% **(sangat baik)**
2. Capain fisik pengelolaan program/kegiatan dengan target sebesar 100% terealisasi sampai tahun ini sebesar 99,97% dengan capaian sebesar 99,97%, **(sangat baik)**
3. Capaian realisasi keuangan pengelolaan program/kegiatan dengan target sebesar 95% terealisasi sampai tahun ini sebesar 90,59% **(sangat baik)**

4.2. SARAN

Pelaksanaan program dan kegiatan untuk mewujudkan sasaran strategis tahun 2017 sudah terlaksana dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat dari capaian seluruh sasaran strategis dengan capaian sangat baik atau pencapaiannya diatas 90%. Ada beberapa indikator capaian yang peningkatannya sangat ekstrim. Hal ini disebabkan karena kesalahan dalam penetapan target kinerja yang sangat rendah .

Berdasarkan hasil evaluasi tahun 2017, maka untuk kedepannya, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi akan mengevaluasi kembali target kinerja yang telah ditetapkan dan disesuaikan dengan kondisi data terakhir dan terus melakukan optimalisasi dalam meningkatkan pemberdayaan Koperasi dan UKM di Sumatera Barat. Selain itu, Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat akan terus berupaya untuk meningkatkan koordinasi, baik internal maupun eksternal dengan instansi terkait lainnya dalam rangka mewujudkan sinkronisasi program dan kegiatan serta monitoring evaluasi terhadap apa yang telah dilaksanakan, terutama selama tahun 2017.

Demikian Laporan Kinerja Dinas Koperasidan UMKM Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2017 ini disusun sebagai salah satu wujud pertanggungjawaban kepada publik. Selanjutnya, diharapkan laporan ini dapat menjadi referensi dalam penyusunan perencanaan program dan kegiatan serta mengoptimalkan pencapaian Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat di masa yang akan datang.

KEPALA DINAS

Ir. ZirmaYusri

NIP. 19600902 198503 1 004